



JEJARING KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH

Penulis:

Dr. Sulaiman Zuhti, S.Sos., M.Si. | Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S.
Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP., M.Si. | Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D.

JEJARING KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH

Penulis:

Dr. Sulaiman Zuhdi, S.Sos., M.Si. | Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S.
Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP., M.Si. | Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D.



JEJARING KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH

Penulis:

Dr. Sulaiman Zuhdi, S.Sos., M.Si.

Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S.

Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP., M.Si.

Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Mulyadi Sahaja

ISBN:

978-623-500-231-6

Cetakan Pertama:

Juni, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunianya buku yang berjudul “Jejaring Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan.

Permukiman kumuh merupakan tantangan serius dalam konteks perkembangan perkotaan di berbagai belahan dunia. Masalah ini mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas dasar, ketidakstabilan sosial-ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Dalam kenyataannya, permukiman kumuh tidak hanya merupakan fenomena fisik, tetapi juga mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengembangan permukiman kumuh tidak hanya memerlukan perhatian dari segi fisik, melainkan juga pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Buku ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mendalam tentang kompleksitas masalah permukiman kumuh dan mengeksplorasi berbagai solusi dan kebijakan yang berkelanjutan dapat merangkul berbagai pihak. Melalui pemahaman lebih mendalam, diharapkan dapat mendorong upaya bersama dalam menciptakan perkotaan yang lebih berkeadilan dan berdaya tahan.

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang sudah membantu hingga buku ini dapat terbit. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan bagi siapa saja yang tertarik dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat bawah dan masalah pemerataan pembangunan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 URGENSI JEJARING KEBIJAKAN	1
BAB 2 KONSEP DAN TEORI SEPUTAR JEJARING KEBIJAKAN	15
A. Kemunculan Jejaring Kebijakan	15
B. Memahami Jejaring Kebijakan.....	17
C. Karakteristik Jejaring Kebijakan	21
D. Fungsi Jejaring Kebijakan.....	22
E. Konsep Sentral Teori Jejaring Kebijakan.....	24
1. Aktor (<i>Actor</i>).....	24
2. Sumber Daya (<i>Resources</i>)	26
3. Ketergantungan (<i>Dependency</i>)	27
4. Aturan (<i>Rules</i>)	29
BAB 3 PERMUKIMAN KUMUH	33
A. Pengertian Permukiman Kumuh	33
B. Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh	34
C. Karakteristik Permukiman Kumuh.....	36
D. Pengelolaan Permukiman Kumuh	37
E. Studi Kasus	40
BAB 4 PEKANBARU DAN MASALAH PERMUKIMAN KUMUH	47
A. Sejarah dan Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru	47
B. Potensi dan Permasalahan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.....	53
C. Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh di Indonesia	59
D. Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku di Kota Pekanbaru	65
BAB 5 JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU	81
A. Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru	81
B. Aktor (<i>Actor</i>).....	89
C. Sumber Daya (<i>Resources</i>)	119
D. Ketergantungan (<i>Dependency</i>).....	124
E. Aturan (<i>Rules</i>).....	127
F. Analisa Jejaring Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh.....	132
DAFTAR PUSTAKA	149

1

URGENSI JEJARING KEBIJAKAN

Bahasan pokok dari buku ini mengkaji tentang jejaring kebijakan dalam pengelolaan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Kajian tentang jejaring kebijakan sangat penting dilakukan mengingat pergeseran tata kelola pemerintah dari birokrasi tradisional hierarki dalam administrasi publik menuju tata kelola melalui jejaring kebijakan. Penekanan pada jejaring kebijakan benar-benar didorong karena kompleksitas dan beragamnya masalah sosial untuk disesuaikan dengan struktur pemecahan masalah pemerintah tradisional. Dengan demikian efektivitas hierarki weberian tradisional yang dirancang untuk mengelola masalah-masalah yang ada di masyarakat dan dilema tindakan kolektif dipertanyakan. Sebaliknya pembentukan jejaring kebijakan yang melampaui hierarki formal ini dianggap sebagai tugas penting bagi administrasi publik. Selain itu di kalangan pembuat kebijakan, penciptaan berbagai macam jejaring kebijakan kerjasama ditekankan sebagai strategi penting yang diperlukan demi mewujudkan tujuan program pemerintah.

Jejaring kebijakan ada dan berkembang karena saling ketergantungan dan ini sering terkait dengan kepentingan inti dari para aktor. Saling ketergantungan adalah salah satu aspek kunci dari teori antar organisasi. Hal ini muncul karena para aktor tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu mereka harus berinteraksi dengan organisasi lain untuk melakukan pertukaran sumber daya. Namun fokus utama dari perspektif jejaring kebijakan adalah proses kebijakan yang kompleks yang dihasilkan dari saling ketergantungan aktor dalam mewujudkan inisiatif kebijakan (Klin, 2005:263). Selanjutnya Kicker mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan dalam situasi saling ketergantungan, para aktor perlu menggunakan pendekatan serbaguna dalam upaya mereka untuk mempengaruhi kebijakan dengan memasukkan dampak ketergantungan mereka terhadap aktor-aktor lain ke dalam strategi mereka dan memanfaatkan peluang untuk tata kelola bersama (Kickert et al., 1997:44).

Dalam jejaring kebijakan hanya sedikit aktor yang memiliki kendali langsung atas hasil kebijakan. Sebaliknya mereka mempertahankan segudang kontak jejaring kebijakan untuk mendapatkan pengaruh atas proses

2

KONSEP DAN TEORI SEPUTAR JEJARING KEBIJAKAN

A. KEMUNCULAN JEJARING KEBIJAKAN

Menurut (Scharpf, 1978) dikutip dalam (Hill & Hupe, 2002:59), berpendapat:

It is unlikely, if not impossible, that public policy of any significance could result from the choice process of any single unified actor. Policy formulation and policy implementation are inevitably the result of interactions among a plurality of separate actors with separate interests, goals and strategies (Scharpf, 1978).

Scharpf' mengatakan bahwa tidak mungkin kebijakan publik dengan signifikansi apapun dapat dihasilkan dari proses pemilihan aktor tunggal mana pun. Perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dapat dielakkan merupakan hasil interaksi diantara sejumlah aktor yang terpisah dengan kepentingan, tujuan, dan strategi yang berbeda. Hal ini dipandang sebagai pernyataan perubahan paradigma, yang menjadi landasan banyak teori, studi metodologis dan normatif tentang administrasi dan manajemen publik.

Sebagian besar pakar yang menulis tentang konsep jejaring kebijakan, manajemen jejaring kebijakan atau analisis jejaring kebijakan menawarkan penjelasan berbeda mengenai asal usul jejaring kebijakan dalam administrasi publik dan manajemen publik. Beberapa pakar berpendapat dari sudut deskriptif bahwa administrasi publik selalu dilakukan bersama-sama baik dalam hal perumusan maupun implementasinya dan telah diterima dalam praktik dan teori (Klijn, 2005). Kemudian (Agranoff & McGuire, 1999:21) mengamati bahwa kebangkitan teknologi informasi mau tidak mau telah menciptakan hubungan antar-organisasi, ketergantungan yang meruntuhkan tembok yang mengelilingi hierarki tradisional. Fragmentasi pengetahuan dan teknologi telah menciptakan jejaring kebijakan sebagai bentuk dari pengorganisasian di era informasi.

3

PERMUKIMAN KUMUH

A. PENGERTIAN PEMUKIMAN KUMUH

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
2. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
5. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Terkait dengan permukiman kumuh (*slums*), para ahli memiliki definisi yang beragam tergantung dari aspek sudut pandang para ahli dalam memandang penyebab permasalahan kekumuhan. Permukiman kumuh adalah tempat berkumpulnya anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim dengan kependudukan padat (Adisasmita, 2005). Sejalan dengan itu (Kuswanto et al, 2005) mengatakan permukiman kumuh adalah permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minimal. Pendapat yang sama juga terdapat di OED (*The Oxford Encyclopedic Dictionary*) yang menyediakan dua definisi mengenai permukiman kumuh. Pertama, permukiman kumuh diartikan sebagai jalan belakang yang padat dan kumuh biasanya terdapat di kota dan dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Kedua, permukiman kumuh diartikan rumah atau bangunan yang tidak layak untuk tempat tinggal manusia. (Gilbert, 2007).

4

PEKANBARU DAN MASALAH PERMUKIMAN KUMUH

A. SEJARAH DAN PENYEBAB MUNCULNYA PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU

Kota Pekanbaru merupakan ibukota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, berada di tengah-tengah perlintasan jalur darat yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kampar, yang memiliki sejumlah alasan yang menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan administrasi yang penting di Provinsi Riau. Perkembangan yang pesat di Malaysia dan Singapura di satu sisi dan perkembangan pembangunan di Sumatera di sisi lain membuat posisi Kota Pekanbaru sebagai daerah perantara untuk kegiatan perdagangan dan jasa semakin strategis. Secara spasial Kota Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini dapat dianggap sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota kedepan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mereduksi kemungkinan dampak atau pengaruh negatif yang akan ditimbulkannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003, Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Perkembangan berikutnya adalah penambahan kelurahan menjadi 83 kelurahan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2016. Selanjutnya dengan perkembangan kota yang semakin meningkat, Pemerintah Kota menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2020 tentang penataan kecamatan, sehingga kecamatan yang semula berjumlah 12 kecamatan di mekarkan menjadi 15 kecamatan. Berikut ini gambar peta administrasi Kota Pekanbaru.

5

JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU

A. PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU

Menurut Kickert, kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan dalam jejaring kebijakan aktor independen. Dia menjelaskan bahwa jejaring kebijakan sebagai pola hubungan sosial yang kurang lebih stabil antara aktor yang saling bergantung yang terbentuk di sekitar masalah kebijakan atau program kebijakan (Kickert et al., 1997:6). Ini ditegaskan kembali oleh (Bressers & O'Toole Jr, 1998:218), yang mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai sebuah sistem dimana para aktor mengembangkan pola interaksi dan komunikasi yang relatif tahan lama ditujukan pada masalah kebijakan atau program kebijakan. Selanjutnya (DeLeon & Varda, 2009:62) mengatakan, jejaring kebijakan adalah elemen struktural jejaring kebijakan kolaborasi, mendokumentasikan komponen-komponen seperti timbal balik, kesetaraan, dan representasi dan menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin pasti yang berfungsi mengendalikannya, baik sebagai alat dan struktur implementasi kebijakan publik. Jejaring kebijakan mengasumsikan atribut seperti pertukaran sumber daya, saling ketergantungan antara pemangku kepentingan yang dapat bersifat formal maupun informal. Komposisinya muncul dari kesadaran bahwa pemerintahan birokrasi tunggal tidak efektif sehingga perlu adanya saling menguntungkan, berbagi informasi, mendapatkan dukungan dan legitimasi melalui korelasi dengan lembaga lain.

Dari beberapa pengertian diatas, konsep jejaring kebijakan berkisar pada satu elemen sentral saling ketergantungan. Konsep ini menggambarkan jejaring kebijakan sebagai jejaring kebijakan aktor publik, swasta dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kebijakan pengelolaan permukiman kumuh dan juga menunjukkan pola dari hubungan yang ada antara aktor yang saling bergantung yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Oleh karena pertemuan banyak aktor dalam jejaring kebijakan maka akan mempengaruhi proses kebijakan dan sudah sepatutnya dipastikan bahwa menurut struktur dan sifatnya, pemerintah (walaupun ini tergantung pada konteks) tidak dapat menggunakan kekuatan yang cukup untuk menangani masalah kompleks

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, S., and H. Kriesi. 2007. *The Network Approach. Theories of the Policy Process*. Ed. P. A. Sabatier. Boulder, CO: Westview Press.
- Adisasmita, R. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agranoff, R. 2007. *Managing within networks: Adding value to public organizations*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Bachman, R., & Zaheer, A. 2008. Trust in inter-organizational relations. In S. Cropper M. Ebers, C. Huxham, & P. S. Ring (Eds.), *Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Baker, L. J. 2013. *Indonesia : Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Leech, B. L., & Kimball, D. C. 2009. *Lobbying and Policy Change: who wins, who loses, and why*. Chicago, IL: University Chicago Press.
- Benson, J. K. 1982. *A Framework for Policy Analysis/DL Rogers and DA Whetten (eds) Interorganisational co-ordination: theory, research, and implementation*. Ames: Iowa State University Press.
- Berkes, F. 2002. *Cross-Scale Institutional Linkages: Perspectives from the bottom up. The drama of the commons*. Washington, D.C: National Academy Press.
- Bevir, M. 2011. Governance as theory, practice, and dilemma. In *the sage handbook of governance*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Bickman L., & Rog, D. 2008. *Applied Research Design: A Practical approach*. In *The sage handbook of applied social research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage publications, Inc.
- BPS. 2020. *Data Statistik Sektor*. Pekanbaru: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. 2001. *Cross-Sectoral Policy Networks: Lessons from developing and transitioning countries*. In *getting results through collaboration: Networks and network structures for public policy and management*. Westport, CT: Quorum Books.
- Buckley, R. M., & Kalarickal, J. 2006. *Thirty Years of World Bank Shelter Lender: What have we learned*. Washington, DC: World Bank.

- Cobb, R. W., & Elder, C. D. 1980. *Participation in American Politics: The Dynamics of agenda-building*. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Mixed Methods Procedures. In Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Daft, R. L., & Marcic, D. 2009. *Management: The new workplace*. 6th ed. Florence: Evans Publishing Group.
- Godfroij, A. J. A. 1995. *Public policy networks: Analysis and management in W.J.M. Kickert and F.A Van Vught (eds). Public policy and administration sciences in the Netherlands*. London: Prentice Hall.
- Hajer, M. & Wagenaar (eds). 2003. *Deliberative Policy Analysis: Understanding governance in the network society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasibuan, M.S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helen M. I., & Paul. C.S. 2007. *Research and networks for decision support in the NOAA sectoral applications research program*. Washington, D.C: National Academies Press.
- Hill, M., & Hupe, P. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in theory and in practice*. London: Sage publications Inc.
- Kementerian PUPR. 2019. *Pedoman Teknis Program Kotaku*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- _____. 2021. *National Affordable Housing Program (NAHP)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kenis, P., & Schneider, V. 1991. *Policy networks and policy analysis: Scrutinizing a new analytical toolbox*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Kickert, W. J. M., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. 1997. *Managing Complex Networks: Strategies for the public sector (First Publ)*. London: Sage Publications Inc.
- Klijn, E.-H. 2005. *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2008. *Networks as perspective on policy and implementation. handbook of inter-organizational relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Koestoer, R. H. 2001. *Dimensi Keruangan Kota: teori dan kasus*. Jakarta: UI Press.

- Koppenjan, J., & Klijn, E.-H. 2004. *Managing Uncertainties in Networks : A Network approach to problem solving and decision making*. London: Routledge.
- Kuswartojo, T., Rosnarti, D., Effendi, V., Eko, R., & Sidi, P. 2005. *Perumahan dan permukiman di Indonesia*. Bandung: ITB.
- Laumann, E. O., Heinz, J. P., Nelson, R. L., & Salisbury, R. H. 1991. *Organizations in political action: Representing interests in national policy making*. In *policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Liefferink, D. 2006. *The Dynamics of Policy Arrangements: Turning round the tetrahedron*. In: Arts, B., Leroy, P. (eds) *Institutional dynamics in environmental governance*. Dordrecht: Springer.
- Lune, H., & Berg, B. L. 2017. *Methods for the social sciences*. 9th ed. Global edition. London: Pearson Education Limited.
- Maxwell, J. A. 2013. *Qualitative research design: An interactive approach*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, M. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1994. *Qualitative data analysis: An expended sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patel, A., & Killemssety, N. 2020. *A systematic review of slum policies in the global south: What could we learn from successes and failures of the past?* Washington, D.C: World Bank.
- Peterson, J., & Bomberg, E. 1999. *Decision-making in the European Union*. Basingstoke: Palgrave Macmillan Press.
- Rhodes, R.A.W. 2005. *Policy Network Analysis*. In Ferlie, E. et al (ed). *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Rusli, B. 2015. *Isu-isu krusial administrasi publik kontemporer*. Bandung: Mega Rancagé Press.
- Salim, P., & Salim, Y. 2002. *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Scharpf, F. W. 1978. *Interorganizational policy studies: Issues, concepts and perspectives*. in *interorganizational policy making*. London: Sage.

- _____.2018. Games real actors play: Actor-centered institutionalism in policy research. Boulder, CO: Westview Press.
- Siagian, A. O. 2020. Dasar-dasar manajemen teori, fungsi dan konsep. Purwokerto: Pena Persada.
- Sinulingga, B. D. 1999. Pembangunan Kota: tinjauan regional dan lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugandi, Y. S. 2017. Program untuk Masyarakat Miskin Kota. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. 2009. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Terry, R. G., & Rue, W. L. 2013. Dasar-dasar manajemen, Cetakan ke-14. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thompson, J. D. 1967. Organizations in action. New York: McGraw-Hill. Thompson Organizations in Action.
- Todaro, M. P., & Stilkind, J. 1981. City bias and rural neglect: The dilemma of urban development (Vol. 4). New York: Population Council.
- Un-Habitat. 2015. Habitat III Issue papers informal settlements. New York: United Nations.
- _____.2003. The Challenge of Slums. Global report on human settlements. London: Earthscan Publications Ltd.
- _____.2016. Urbanization and Development: Emerging futures. Nairobi, Kenya: United Nations.
- Usman, H. 2013. Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Horen, B. 2004. Community upgrading and institutional capacity building to benefit the urban poor in Asia. Forum on urban infrastructure and public service delivery to the urban poor, regional focus: Asia. New Delhi: India Habitat Centre.
- Yin, R. K. 2015. Studi kasus desain dan metode. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Adama, O. 2020. Slum upgrading in the era of world-class city construction: The case of Lagos, Nigeria. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 12(2), 219–235.
- Agranoff, R., & McGuire, M. 1999. Managing in network settings. *Review of Policy Research*, 16(1), 18–41.
- _____.2001. Big questions in public network management research. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 11(3), 295–326.

- Anwar, B., Xiao, Z., Akter, S., & Rehman, R. U. 2017. Sustainable urbanization and development goals strategy through public-private partnerships in a South-Asian Metropolis. *Sustainability*, 9(11), 1-26.
- Archer, D. 2012. Baan mankong participatory slum upgrading in Bangkok, Thailand: Community perceptions of outcomes and security of tenure. *Habitat International*, 36(1), 178–184.
- Bai, X., Colbert, M. L., McPhearson, T., Roberts, D., Siri, J., Walsh, B., & Webb, B. 2019. Networking urban science, policy and practice for sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 39, 114–122.
- Basu, I. 2019. Elite discourse coalitions and the governance of ‘Smart Spaces’: politics, power and privilege in india’s smart cities mission. *Political Geography*, 68, 77–85.
- Bevir, M., & Richards, D. 2009. Decentring policy networks: A theoretical agenda. *Public Administration*, 87(1), 3–14.
- Beyers, J., & Braun, C. 2014. Ties that count: Explaining interest group access to policymakers. *Journal of Public Policy*, 34(1), 93–121.
- Börzel, T. A. 1998. Organizing babylon-on the different conceptions of policy networks. *Public Administration*, 76(2), 253–273.
- Bouwen, P. 2002. Corporate lobbying in the European Union : The logic of access. *Journal of European Public Policy*, 9(3), 365–390.
- Bressers, H. T. A., & O’Toole Jr, L. J. 1998. The selection of policy instruments: A network-based perspective. *Journal of Public Policy*, 18(3), 213–239.
- Buchari, R. A., Rusli, B., Sumaryana, A., & Ramdhan, K. M. 2018. Participatory development between government and local social movement to increase security for the low-income communities in Bandung Barat, Indonesia. *Central European Journal of International and Security Studies*, 12(4), 338–352.
- Buckley, J. M. 2012. From centered to networked. *Journal of Urban History*, 38(3), 603–609.
- Catal, C., & Mishra, D. 2013. Test case prioritization: A systematic mapping study. *Software Quality Journal*, 21(3), 445–478.
- Celhay, P. A., & Gil, D. 2020. The function and credibility of urban slums: Evidence on informal settlements and affordable housing in Chile. *Cities*, 99, 102605.
- Cherunya, P. C., Truffer, B., Samuel, E. M., & Lüthi, C. 2021. The challenges of livelihoods reconstruction in the context of informal settlement upgrading. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(1), 168–190.

- Christ, K., Baier, K., & Azzam, R. 2016. Slums and informal housing in India: A critical look at official statistics with regard to water and sanitation. *Water International*, 41(2), 308–324.
- Dahan, N., Doh, J., & Guay, T. 2006. The role of multinational corporations in transnational institution building: A Policy network perspective. *Human Relations*, 59(11), 1571–1600.
- Debnath, R., Simoes, G. M. F., Bardhan, R., Leder, S. M., Lamberts, R., & Sunikka-Blank, M. 2020. Energy justice in slum rehabilitation housing: An empirical exploration of built environment effects on socio-cultural energy demand. *Sustainability*, 12, 1–27.
- Dekel, T., Meir, A., & Alfasi, N. 2019. Formalizing infrastructures, civic networks and production of space: bedouin informal settlements in be'er-sheva metropolis. *Land Use Policy*, 81, 91–99.
- DeLeon, P., & Varda, D. M. 2009. Toward a theory of collaborative policy networks: Identifying structural tendencies. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59–74.
- der Krogt, F. J. 1998. Learning Network Theory: The tension between learning systems and work systems in organizations. *Human Resource Development Quarterly*, 9(2), 157–177.
- Di Gregorio, M., Fatorelli, L., Paavola, J., Locatelli, B., Pramova, E., Nurrochmat, D. R., May, P. H., Brockhaus, M., Sari, I. M., & Kusumadewi, S. D. 2019. Multi-level governance and power in climate change policy networks. *Global Environmental Change*, 54, 64–77.
- Doe, B., Peprah, C., & Chidziwisano, J. R. 2020. Sustainability of slum upgrading interventions: perception of low-income households in Malawi and Ghana. *Cities*, 107, 102946.
- Dredge, D. 2006. Networks, Conflict and collaborative communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 562–581.
- Dupont, V., & Gowda, M. M. S. 2020. Slum-free city planning versus durable slums. Insights from Delhi, India. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 12(1), 34–51.
- Evans, B., Joas, M., Sundback, S., & Theobald, K. 2006. Governing local sustainability. *Journal of Environmental Planning and Management*, 49(6), 849–867.
- Fiorati, R. C., Cândido, F. C. A., de Souza, L. B., Arruda Aragão, F. B., de Souza, J., Panúncio-Pinto, M. P., Pinto, I. C., Serrano Gallardo, P., & Arcêncio, R. A. 2020. Strategies for the advancement of intersectoral networks and equity in vulnerable territories through community-based participatory research in Brazil. *Critical Public Health*, 1–14.

- Fitria, N., & Setiawan, R. 2014. Identifikasi Karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik ITS*, 3, 2, C240-C244.
- Gasparre, A. 2011. Emerging networks of organized urban poor: Restructuring the engagement with government toward the inclusion of the excluded. *Voluntas*, 22(4), 779–810.
- Gilbert, A. 2007. The return of the slum: does language matter? *International Journal of Urban and Regional Research*, 31(4), 697–713.
- Hacking, N., & Flynn, A. 2017. Networks, power and knowledge in the planning system: A case study of energy from waste. *Progress in Planning*, 113, 1–37.
- Hauge, Å. L., Hanssen, G. S., & Flyen, C. 2019. Multilevel networks for climate change adaptation – what works? *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 11(2), 215–234.
- Heaney, M. T. 2014. Multiplex networks and interest group influence reputation: An exponential random graph model. *Social Networks*, 36(1), 66–81.
- Henning, C. H. C. A. 2009. Networks of power in the CAP system of the EU-15 and EU-27. *Journal of Public Policy*, 29(2), 153–177.
- Henry, A., & Dietz, T. 2011. Information, networks, and the complexity of trust in commons governance. *International Journal of the Commons*, 5(2), 188-212.
- Isidiho, A. O., & Sabran, M. S. B. 2016. Evaluating the top-bottom and bottom-up community development approaches: Mixed method approach as alternative for rural un-educated communities in developing countries. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(4), 266–273.
- Jalil, A. 2005. Kota: Dari perspektif urbanisasi. *Jurnal Industri dan Perkotaan*, 9(15), 833–845.
- Jones, P. 2017. Formalizing the informal: Understanding the position of informal settlements and slums in sustainable urbanization policies and strategies in Bandung, Indonesia. *Sustainability*, 9(8), 1–27.
- Klijn, E.-H. 2001. Rules as institutional context for decision making in networks: The approach to postwar housing districts in two cities. *Administration & Society*, 33(2), 133–164.
- Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. 2000. Public management and policy networks: Foundations of a network approach to governance. *Public Management an International Journal of Research and Theory*, 2(2), 135–158.

- Klijin, E.-H, Koppenjan, J., & Termeer, K. 1995. Managing networks in the public sector: A theoretical study of management strategies in policy networks. *Public Administration*, 73(3), 437–454.
- Komarudin, Alfisa, W., & Setyaningrum, E. 1999. Pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–458.
- Koontz, T. M., & Newig, J. 2014. From planning to implementation: top-down and bottom-up approaches for collaborative watershed management. *Policy Studies Journal*, 42(3), 416–442.
- Leyva-de la Hiz, D. I. 2019. Environmental innovations and policy network styles: The influence of pluralism and corporativism. *Journal of Cleaner Production*, 232, 839–847.
- Li, T. H. Y., Ng, S. T., & Skitmore, M. 2012. Conflict or consensus: An investigation of stakeholder concerns during the participation process of major infrastructure and construction projects in Hong Kong. *Habitat International*, 36(2), 333–342.
- Li, Z., Alakshendra, A., & Smith, S. 2021. A people-centered perspective on Slum formalization policy. *Housing Policy Debate*. 1–20.
- Liu, S., & Zhang, Y. 2020. Cities without slums? China’s land regime and dual-track urbanization. *Cities*, 101. 102652.
- Lutz-Ley, A. N., Scott, C. A., Wilder, M., Varady, R. G., Ocampo-Melgar, A., Lara-Valencia, F., Zuniga-Teran, A. A., Buechler, S., Díaz-Caravantes, R., Ribeiro Neto, A., Pineda-Pablos, N., & Martín, F. 2021. Dialogic science-policy networks for water security governance in the arid Americas. *Environmental Development*, 38. 1–14.
- Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P. 2016. The study of slums as social and physical constructs: Challenges and emerging research opportunities. *Regional Studies, Regional Science*, 3(1), 399–419.
- Mahadevia, D., Bhatia, N., & Bhatt, B. 2018. Private sector in affordable housing? Case of slum rehabilitation scheme in Ahmedabad, India. *Environment and Urbanization Asia*, 9(1), 1–17.
- Marsh, D., & Smith, M. 2000. Understanding policy networks: Towards a dialectical approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21.
- McAllister, R. R. J., McCrea, R., & Lubell, M. N. 2014. Policy networks, stakeholder interactions and climate adaptation in the region of south east Queensland, Australia. *Regional Environmental Change*, 14(2), 527–539.
- Minnery, J., Argo, T., Winarso, H., Hau, D., Veneracion, C. C., Forbes, D., & Childs, I. 2013. Slum upgrading and urban governance: Case studies in three South East Asian cities. *Habitat International*, 39, 162–169.

- Nkrumah Agyabeng, A., Nyigmah Bawole, J., Ahenkan, A., Mensah, J. K., & Preko, A. 2022. Understanding policy framework for slum governance in a developing country. *International Journal of Public Leadership*, 18(4), 355–368.
- Nkrumah Agyabeng, A., & Preko, A. 2021. A stakeholder analysis of government policy intervention in the Ghana slum communities. *Housing, Care and Support*, 24(2), 41–53.
- Obaitor, O. S., Lawanson, T. O., Stellmes, M., & Lakes, T. 2021. Social capital: higher resilience in Slums in the Lagos-metropolis. *Sustainability*, 13(7), 1–18.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L. 2015. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64, 1–18.
- Phelps, C., Heidl, R., & Wadhwa, A. 2012. Knowledge, networks, and knowledge networks: A review and research agenda. *Journal of Management*, 38(4), 1115–1166.
- Putro, J. D. 2011. Penataan kawasan kumuh pinggiran sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, 11(1), 19–34.
- Quadrat-Ullah, H., Akrofi, M. M. C., & Kayal, A. 2020. Analyzing actors engagement in sustainable energy planning at the local level in Ghana: An empirical study. *Energies*, 13(8), 1–20.
- Ragheb, A., & El-Ashmawy, R. 2021. Strategic actions of urban development to define the intervention policies of slums. *City, Territory and Architecture*, 8 (10), 1–18.
- Rahman, M. A. U., & Ley, A. 2020. Institutionalising informal networks of the urban poor under an enabling paradigm: A Case study on greenland slum of Khulna city in Bangladesh. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 12(2), 187–201.
- Rhodes, R. A. W., & Marsh, D. 1992. New directions in the study of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21(1), 181–205.
- Roitman, S. 2016. Dynamics and resilience of informal areas. *Dynamics and Resilience of Informal Areas*,
- Roy, D., & Lees, M. 2020. Understanding resilience in slums using an agent-based model. *Computers, Environment and Urban Systems*, 80, 101458.
- Rozas-Vásquez, D., Fürst, C., Geneletti, D., & Muñoz, F. 2017. Multi-Actor Involvement for integrating ecosystem services in strategic environmental assessment of spatial plans. *Environmental Impact Assessment Review*, 62, 135–146.
- Ruffin, F. A. 2010. Collaborative network management for urban revitalization. *Public Performance & Management Review*, 33(3), 459–487.

- Saber, H., & Gomaa, S. S. 2020. Policy networks as a unit of analysis of public policies a case study of the social and health insurance policy network in Egypt (2015–2019). *Review of Economics and Political Science*.
- Sarkar, A., & Bardhan, R. 2020. Socio-physical liveability through socio-spatiality in low-income resettlement archetypes-a case of slum rehabilitation housing in Mumbai, India. *Cities*, 105, 102840.
- Sherman, M. H., & Ford, J. 2014. Stakeholder engagement in adaptation interventions: An evaluation of projects in developing nations. *Climate Policy*, 14(3), 417–441.
- Sinha, P., Shankar, R., Vrat, P., & Mathur, S. 2019. Power distribution reforms: delhi's public-private partnership model: A boost to the sector. *Journal of Advances in Management Research*, 17(2), 226–250.
- Smith, N. R. 2014. Beyond top-down/bottom-up: Village transformation on China's urban edge. *Cities*, 41, 209–220.
- Surya, B., Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. 2020. Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar city, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability*, 12, 18.
- Teets, J. 2018. The power of policy networks in authoritarian regimes: Changing environmental policy in China. *Governance*, 31(1), 125–141.
- Takyi, S. A., Amponsah, O., Yeboah, A. S., & Mantey, E. 2021. Locational analysis of slums and the effects of slum dweller's activities on the social, economic and ecological facets of the city: insights from Kumasi in Ghana. *Geo Journal*, 86(6), 2467–2481.
- Toikka, A. 2010. Exploring the composition of communication networks of governance - A Case study on local environmental policy in Helsinki, Finland. *Environmental Policy and Governance*, 20(2), 135–145.
- Van Bueren, E. M., Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. 2003. Dealing with wicked problems in networks: Analyzing an environmental debate from a network perspective. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13(2), 193–212.
- Vignola, R., McDaniels, T. L., & Scholz, R. W. 2013. Governance structures for ecosystem-based adaptation: Using policy-network analysis to identify key organizations for bridging information across scales and policy areas. *Environmental Science and Policy*, 31, 71–84.
- Wikantiyoso, R., Utara, S., & Barat, S. 2010. Mitigasi bencana di perkotaan ; adaptasi atauantisipasi perencanaan dan perancangan kota ? (Potensi kearifan lokal dalam perencanaan dan perancangan kota untuk upaya mitigasi bencana). *Local Wisdom*, 2(1), 18–29.

- Yap, K. S., & De Wandeler, K. 2010. Self-help housing in Bangkok. *Habitat International*, 34(3), 332–341.
- Yeboah, V., Asibey, M. O., & Abdulai, A.-S. J. 2021. Slum upgrading approaches from a social diversity perspective in the global south: Lessons from the Brazil, Kenya and Thailand cases. *Cities*, 113. 103164.
- Zhang, D., Fan, F., & Park, S. Do. 2019. Network analysis of actors and policy keywords for sustainable environmental governance: Focusing on Chinese environmental policy. *Sustainability*, 11(15), 1–29.

Disertasi

- Surtiani, E. E. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga). Semarang: Universitas Diponegoro
- Kim, D. Y. 2016. A Policy Network in Smart Tourism Policymaking: A Korea Case, Guelph, Ontario, Canada: University of Guelph.
- Zuma, N. E. 2015. Managing Policy Networks: A Case Study of KwaZulu-Natal Community Crime Prevention Association. Pietermaritzburg, South Africa: University Of Kwazulu-Natal.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
- Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.13 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Keputusan Walikota Pekanbaru No. 518 tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Internet

<https://tribunterkini.com/web/detail/Btrqustextpsulhly533/dinasperumahan-rakyat-dan-kawasan-permukiman-pekanbarulaksanakan-lokakarya-nsupprogram-kota-tanpa-kumuh-kotaku-kota-pekanbaru.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

https://sikapku.com/sikapku_new/ diakses pada tanggal 8 Januari 2022.



JEJARING KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH

"Jejaring Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh" menjadi penjelasan mendalam tentang upaya kolektif dan integratif dalam menanggulangi tantangan permukiman kumuh yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Buku ini mengupas tata kelola kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga *non-pemerintah*, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan solusi berkelanjutan dan inklusif.

Dengan merinci jejak langkah kebijakan, strategi kolaboratif, dan dampak yang dihasilkannya, buku ini membuka wawasan tentang pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam membentuk permukiman yang layak huni dan berdaya. Melalui telaah komprehensif ini, diharapkan pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika jejaring kebijakan dalam merespons permasalahan kompleks permukiman kumuh.